

Penguatan Budaya Anti Korupsi dalam Upaya Membangun Sikap Jujur Dikalangan Pelajar SMAN 2 Boyolali

Rima Maya Siva Kahfi^{1*}, Rifdah Rasikhah², Restu Dewa Saputra³, Sri Hartini⁴

^{1,2,3,4}Universitas Boyolali, Jl. Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.
E-mail: restucuy027@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4741>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 Dec 2025

Revised: 25 Dec 2025

Accepted: 31 Dec 2025

Kata Kunci:

Pendidikan, Anti
Korupsi, Jujur.

Keywords:

Education, Anti-
Corruption, Honest.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji pentingnya penguatan budaya anti-korupsi untuk membangun sikap jujur di kalangan pelajar SMAN 2 Boyolali. Korupsi mengancam tatanan kehidupan berbangsa, tidak hanya di pemerintah tapi juga di lingkungan pendidikan, seperti ketidakjujuran, korupsi waktu, dan kecurangan di sekolah. Hal ini menekankan urgensi penanaman nilai anti-korupsi sejak dini. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosialisasi interaktif dengan media visual berupa video edukatif tentang pendidikan anti-korupsi. Kegiatan dilaksanakan di kelas 11-6 SMA Negeri 2 Boyolali pada 19 November 2025, selama 45 menit. Proses dimulai dengan wawancara guru BK untuk informasi perilaku siswa, penyampaian materi oleh narasumber, pemutaran video, dan sesi tanya jawab. Hasil menunjukkan siswa antusias memahami materi, memperoleh pengetahuan baru tentang kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Sebanyak 36 siswa perwakilan kelas berkomitmen menerapkan nilai anti-korupsi, menjunjung moral kejujuran, dan berani menegur teman yang tidak jujur. Penelitian ini menegaskan peran pendidikan anti-korupsi di SMA sebagai strategi pencegahan korupsi dan pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, bermoral, serta berkontribusi pada budaya kejujuran dan keadilan di masyarakat.

This study examines the importance of strengthening an anti-corruption culture to build honest attitudes among students of SMAN 2 Boyolali. Corruption threatens the order of national life, not only in government but also in educational environments, such as dishonesty, time corruption, and conditions in schools. This emphasizes the urgency of instilling anti-corruption values from an early age. The research method used an interactive socialization approach with educational videos about anti-corruption education. The activity was carried out in grades 11-6 of SMAN 2 Boyolali on November 19, 2025, for 45 minutes. The process began with an interview with the guidance counselor for information on student behavior, delivery of material by the resource person, video screening, and a question and answer session. The outcome showed that students were enthusiastic about understanding the material, gaining new knowledge about honesty, responsibility, and integrity. A total of 36 students representing the class committed to implementing anti-corruption values, upholding moral honesty, and daring to reprimand dishonest friends. This study emphasizes the role of anti-corruption education in high schools as a strategy for preventing corruption and developing the character of a young generation with integrity and morals, and contributing to a culture of honesty and justice in society.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rima Maya Siva Kahfi, et al (2025). Penguatan Budaya Anti Korupsi dalam Upaya Membangun Sikap Jujur Dikalangan Pelajar SMAN 2 Boyolali, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4741>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang luar biasa saat ini dihadapi oleh negara dan bangsa ini. Tindakan kejahatan korupsi terjadi dari hal biasa sederhana, contohnya seperti memberikan gratifikasi atau tindakan suap guna mempermudah administrasi dikelurahan hingga urusan besar-besaran. Melihat dari kasus tersebut, pemerintah sangat berupaya dalam menangani tindakan pemberantasan korupsi. Salah satu Langkah yang dilakukan adalah membentuk lembaga khusus seperti KPK (Nur, 2021). Intensitas penindakan terhadap tindak pidana korupsi pada tahun 2018 tercermin dari penanganan 93 perkara oleh lembaga negara yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mayoritas perkara terjadi pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota sebanyak 61 kasus, diikuti oleh 17 kasus pada tingkat provinsi, 13 kasus di kementerian atau lembaga, serta 2 kasus di lingkungan DPR/DPRD. Modus operandi yang dominan meliputi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta praktik penyuapan yang tergolong sebagai gratifikasi. Praktik suap kerap mengalami normalisasi sosial dan dipersepsikan sebagai kebiasaan, seperti pemberian hadiah dalam skala kecil, meskipun bertentangan dengan prinsip integritas dan kejujuran. (Wibawa, 2021)

Indonesia adalah negara yang menganut asas hukum yang terpacu dalam undang-undang hukum, setiap perilaku yang diperbuat akan diatur oleh seperangkat aturan dan setiap peraturan ada sanksi norma hukumnya, seperti contoh kasus korupsi saat ini dalam memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah, sebab dari hal kecil yang diperbuat apapun tindakan mengenai korupsi bukanlah tindakan yang baik. Kejujuran adalah sifat atau suatu keadaan jujur dan ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan menyatakan sesuatu sesuai fakta kenyataan yang di jalani dan dirasakan (Kasmanto, 2023).

Dorongan terhadap praktik korupsi kerap muncul dalam konteks pembangunan, khususnya pada pelaksanaan proyek infrastruktur yang telah direncanakan namun mengalami hambatan akibat proses regulasi yang berjalan lamban. Kondisi tersebut mendorong penggunaan mekanisme tidak resmi melalui pemberian imbalan atau suap dalam bentuk uang sebagai jalan pintas. Praktik ini berlangsung secara berulang sehingga alokasi dana publik beralih ke pihak yang tidak semestinya. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat menyebabkan pola tersebut terus berlanjut dan pada akhirnya melahirkan kelompok-kelompok yang berorientasi pada pengayaan diri secara pribadi dengan contoh korupsi tersebut menimbulkan generasi muda yang kurang baik terutama anak sekolah dasar, peristiwa tersebut sering terjadi dikalangan elit politik dengan kekuasaan yang mereka memiliki sewenang wenang dalam menyalahkan kekuasaan dan dengan mudah melakukan tindakan pidana korupsi. Urgensi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semakin nyata dalam konteks nasional, terutama apabila disertai dengan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Penanaman nilai antikorupsi sejak jenjang sekolah dasar dipandang strategis karena fase ini merupakan tahap awal pembentukan individu sebelum terlibat secara penuh dalam proses sosialisasi di lingkungan masyarakat.

Pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 2 Boyolali menjadi salah satu upaya penting bagi sekolah untuk membentuk karakter siswa siswi yang jujur, berintegritas, dan memiliki rasa tanggung jawab. sebagai upaya menciptakan sikap dan budaya dari anti korupsi dalam pendidikan yang menjunjung tinggi moral kejujuran, dengan adanya sosialisasi kepada siswa siswi yang berupa pemberian pengetahuan tentang pentingnya anti korupsi di lingkungan sekolah maupun dalam dunia pendidikan. upaya ini menegaskan bahwa nilai anti korupsi harus di pahami dan diajarkan sejak dini.

METODE

Kegiatan penyuluhan atau pengabdian masyarakat ini dilakukan di kelas 11-6 SMA Negeri 2 Boyolali yang terletak didesa Kebonbimo, Kec Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025, dengan durasi waktu selama 45 menit yang dimulai pada pukul 08.00-08.45 WIB.

Pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan sosialisasi interaktif yang dipadukan dengan adanya media visual berupa video yang ditampilkan mengenai pendidikan anti korupsi, dengan metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan ini dapat memungkinkan siswa untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penyajian video

ini, pesan-pesan dapat tersampaikan lebih menarik hingga siswa lebih mudah memahami isi yang terdapat pada video.

Proses kegiatan sosialisasi ini diawali dengan adanya wawancara dengan guru BK untuk mendapat informasi mengenai perilaku siswa dan biodata sekolah yang akan menjadi tempat penyuluhan. tahap berikutnya adalah memberikan materi kepada siswa dan penyajian video bersama narasumber yang menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. tahap terakhir yaitu sesi tanya jawab yang diberikan narasumber kepada siswa untuk melihat apakah siswa tersebut memperhatikan atau paham mengenai pendidikan antikorupsi yang sudah dijelaskan. Kegiatan ini diharapkan bisa membuat siswa menjadi lebih jujur dan tanggung jawab, karena melalui kegiatan ini siswa dilatih untuk dapat memahami dan membangun nilai-nilai anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi yang terjadi saat ini marak beredar dimana-mana terutama dari segi pemerintahan hingga masyarakat kebawah serta bisa terjadi di generasi saat ini dan bisa menyerang di lingkungan sekolah, korupsi sangatlah memprihatinkan dan berdampak buruk bagi kehidupan berdasarkan pasal 2 UU No, 31 Tahun 1999. Kerugian terhadap tatanan keuangan negara dan perekonomian nasional merupakan konsekuensi utama dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain, yang secara konseptual diklasifikasikan sebagai korupsi. Dalam pemahaman umum, korupsi dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi negara atau lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelakunya. (Suryani, 2025)

Pemicu terjadinya korupsi dapat ditelusuri dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, kecenderungan perilaku individu seperti lemahnya integritas moral, sifat tamak, serta gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan pendapatan yang sah meningkatkan kerentanan terhadap praktik koruptif. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang cenderung menilai dan menghargai individu berdasarkan kepemilikan materi, sehingga membentuk toleransi sosial terhadap korupsi. Dari sisi ekonomi, ketidakcukupan pendapatan turut memperkuat dorongan tersebut. Aspek politik tercermin melalui lemahnya kontrol sosial sebagai mekanisme pengarah perilaku agar selaras dengan norma masyarakat. Adapun dalam konteks organisasi, minimnya keteladanan pimpinan, pengawasan yang tidak efektif, serta rendahnya kepatuhan terhadap etika hukum dan tata kelola pemerintahan memperbesar peluang terjadinya korupsi. (Imelda, 2017)

Dalam dunia pendidikan perlu dikenalkan dengan apa itu pendidikan anti korupsi dan menanamkan nilai moral kejujuran dalam lingkungan sekolah dan tindakan anti korupsi. Target utama dalam dunia pendidikan yaitu memberitau suatu peristiwa korupsi yang meliputi standar kriterianya, sebab ada akibatnya dalam mengembangkan perilaku yang tidak toleran pada suatu tindakan penyebab tindakan korupsi. Dengan ini menyatakan bahwa kemungkinan peluang dalam menghadapi korupsi sangatlah besar. Dengan ikut serta berkontribusi terhadap suatu ukuran kriteria yang telah ditentukan sebelumnya seperti merealisasikan penerapan aspek nilai kejujuran serta menanamkan sikap budaya dan korupsi. Untuk masalah korupsi ini, kita memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan lembaga penegak hukum, kebijakan pemerintah, dan pendidikan berjenjang di sekolah. Sejumlah negara sudah menerapkan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dengan hasilnya sangat menakjubkan. Pada tahun 1974 Hongkong dikenal sebagai Negara yang tercatat korupsi paling tinggi, dengan ungkapan “dari kandungan hingga kubur” yang berarti korupsi ada sejak lahir hingga mati. Kini, Hongkong merupakan satu diantaranya Negara di Asia yaitu dengan daftar korupsi (CPI) tertinggi sebesar 8,3 menempati peringkat ke-15 sebagai Negara paling bersih dari 158 negara di dunia. Kesuksesan ini berasal dari tindakan bersama di semua bidang, dikategorikan yang meliputi pendidikan anti korupsi yang secara resmi diterapkan di sekolah-sekolah.

Upaya pembangunan pendidikan tentang budaya anti korupsi adalah bagian penting dalam memberikan pemahaman pengetahuan dalam nilai moral kejujuran dan sikap penting tindakan, anti korupsi dalam membangun perilaku rasa hormat dan tanggung jawab terhadap peraturan norma hukum yang berlaku saat ini. Guru dalam tenaga pendidikan berlaku penting dalam Upaya ini dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah, sering kita ketemu guru hanya memberikan ajaran tentang ilmu pengetahuan saja sedangkan penerapan nilai anti korupsi juga sangatlah penting

bagi siswa siswi. Contoh yang sering dilakukan dari hal kecil seperti kecurangan dalam melaksanakan ujian, korupsi waktu, bolos sekolah, izin ketoilet dan ternyata bolos dikantin, dan tawuraan, dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan sikap korupsi yang mereka lakukan secara tidak mereka sadari, siswa siswi kurang mengetahui dan tidak sadar akan tindakan tersebut dikarenakan kurangnya edukasi tentang budaya anti korupsi serta kurangnya moral kejujuran generasi muda saat ini, penerapan pendidikan anti korupsi disekolah menengah atas memerlukan strategi yang tepat dan mendalam dikarenakan sikap tersebut seharusnya ditanamkan sejak usia dini sedangkan penerapan tersebut baru dilakukan sekarang, secara teknis melibatkan beberapa langkah yaitu menanamkan sikap kejujuran rasa tanggung jawab serta intergitas nilai anti korupsi metode yang harus ditanamkan dilingkungan sekolah demi menerapkan moral prilaku yang baik.dengan menerapkan peraturan yang mendukung aspek aspek tersebut.

Peran Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Anti Korupsi dan Kejujuran

Pengembangan potensi manusia melalui pembentukan kecerdasan merupakan fungsi utama pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui penerapan sistem pendidikan nasional. Sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam pembentukan moral dan sikap yang menunjang peningkatan mutu pendidikan (Salistina, 2015). Pengelolaan pendidikan nasional diarahkan sebagai instrumen strategis dalam menanamkan budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan, selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pembentukan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa. Dalam konteks Indonesia, praktik korupsi telah berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan, dengan akar persoalan yang bersumber pada kebiasaan, perilaku kolektif, serta pola pikir masyarakat (Kristiono, 2018). Pemanfaatan sumber daya keuangan secara tidak sah demi kepentingan individu merupakan esensi dari korupsi, suatu fenomena yang berkembang secara masif dan berdampak destruktif terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penanaman pendidikan karakter sejak tahap awal perkembangan individu (Setiawan, 2023).

Penginternalisasian nilai-nilai kebajikan dalam pendidikan karakter diwujudkan melalui pengembangan beragam sifat positif yang berfungsi mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma yang berlaku, sekaligus menghargai keberagaman persepsi nilai personal yang diekspresikan di lingkungan sekolah. Orientasi utama pendidikan karakter berlandaskan tujuan etis, namun implementasinya juga menekankan penguatan keterampilan esensial yang menunjang perkembangan sosial peserta didik. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai benar dan salah, melainkan menekankan proses pembiasaan terhadap perilaku baik agar peserta didik mampu memahami, menghayati, dan secara sukarela merealisasikannya. Karakter dipahami sebagai disposisi individu yang pembentukannya berkaitan erat dengan fungsi sistem saraf, khususnya otak (Rohendi, 2016).

Karakter perlu diperhatikan saat ini dikarenakan GEN Z jaman sekarang minim akan sikap yang baik serta sikap tidak jujur yang mereka perbuat, karakter anti korupsi adalah sikap dan Tindakan teratur dalam melawan korupsi serta menjunjung tinggi kejujuran ,membangun generasi yang lebih maju dan bermoral. Dalam upaya membentuk karakter tersebut kita perlu pahami bahwa didalam dunia pendidikan sangatlah penting tujuan dibentuknya penerapan karakter siswa adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya etika kejujuraan.

Dengan itu kami melakukan kegiatan sosialisasi dengan siswa siswi SMA NEGERI 2 Boyolali dengan bertujuan memberikan pemahaman tentang nilai kejujuran serta memerangi anti korupsi dilingkungan sekolah, setelah kita amati siswa siswi sangatlah antusias dalam memahami materi anti korupsi yang diberikan oleh pemeteri yang memberikan pengetahuan baru bagi mereka, bahwasanya meteri anti korupsi itu sangatlah begitu penting untuk diterapkan sehari hari dilingkungan sekolah, yang menjunjung tinggi nilai kejujuraan, nilai kejujuran muncul kepada siswa tentang rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan, penerapaaan nilai kejujuraan dalam membangun karakter siswa dapat dilakukan melalui pembiasaan melalui peduli dengan lingkungan, beretikaan baik, berani jujur dalam melakukan kesalahan, menolak bentuk suap dalam bentuk apapun itu.

Melalui kegiatan ini siswa yang berjumlah 36 dari perwakilan kelas 11(6) kami memberikan kuis menarik dan mendapatkan hadiah kecil untuk siswa, untuk menarik perhatian agar mereka lebih peduli tentang sikap dalam memerangi anti korupsi itu begitu penting, upaya yang kita lakukan berdampak positif bagi siswa agar mereka sadar akan edukasi yang kami sampaikan dan berjanji akan menanamkan nilai-nilai tersebut, agar menjadi budaya lingkungan yang baik dan berbasas moral kejujuran serta tanggung jawab, menegur jika didapati teman yang berperilaku tidak jujur dan memberikan saran yang baik dan benar serta menerapkan nilai anti korupsi didalamnya dengan demikian siswa dapat membentuk karakter yang berintegritas serta bermoral yang baik, sebagai generasi muda siswa sebaiknya sadar akan pentingnya nilai-nilai tersebut dan tenaga pengajar seperti guru sangatlah penting dalam upaya menanamkan edukasi dari awal sekolah dasar atau peran orang tua juga sangatlah penting agar ditanamkan sejak usia dini.

SIMPULAN

Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah hal yang penting bagi generasi muda penerus bangsa agar tercipta generasi emas yang bernilai moral kejujuran serta pengembangan diri berbudi luhur yang baik, pendidikan anti korupsi pada sekolah menengah atas memegang peran penting untuk strategi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekolah, pada tahap pengembangan moral kejujuran hal tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya anti korupsi dan bahayanya korupsi dari segi pemerintah hingga di lingkungan sekolah, kejujuran dapat diterapkan melalui pembelajaran serta peran penting guru bagi siswa, kegiatan sehari-hari di sekolah dengan ditanamkannya sikap kejujuran, disiplin serta rasa tanggung jawab pada diri dan keadilan, siswa dapat bersikap pada hal yang benar dan salah dengan mempraktkannya pada kehidupan sehari-hari. Akumulasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pengajaran penanaman anti korupsi nantinya memunculkan kesadaran bahwasanya tindakan korupsi sangat merugikan semua elemen sosial. Dengan demikian, pembentukan generasi muda diarahkan agar berkembang sebagai warga negara yang partisipatif, memiliki sikap penolakan tegas terhadap segala bentuk korupsi, serta mampu berkontribusi dalam penguatan budaya moral yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada Sri Hartini, S.I.Kom., M.I.Kom. atas bimbingan dan arahan selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi dan rasa terima kasih turut diberikan pula pada Dr. Dwi Imroatus Sholikhah, S.H., M.H. atas materi, wawasan, dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah memperkaya pemahaman penulis dalam bidang penelitian ini. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi substantif serta memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang keilmuan yang relevan.

REFERENSI

- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>
- Kasmanto, R. (2023). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Nur, S. M. (2021). Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Eduscience*, 6, 111.
- Rohendi, E. (2016). Pendidikan Karakter Di Sekolah. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 3(1). <https://doi.org/10.17509/eh.v3i1.2795>
- Setiawan, A. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*. 01(01).
- Suryani, I. (2025). *PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI*.
- Wibawa, D. S. (2021). *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif Anti-Corruption Education as a Preventive Action for Corrupt Behavior*. 7168(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>